

Jumat, 28 Oktober 2011

Wali Kota Harapkan WTP

Pontianak, BERKAT.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan penyelesaian permasalahan pencatatan dan penilaian aset daerah tahun ini agar opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke depan. "Ke depan diharapkan pengelolaan anggaran dan manajemen Kota Pontianak semakin baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji, SH, M.Hum, belum lama ini.

Menurut Sutarmidji, Pemkot Pontianak sebagai salah satu institusi pemerintahan, membutuhkan sistem pengendalian intern pemerintahan yang handal, menyeluruh dan utuh dengan mekanisme koordinasi yang efektif di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Nah, koordinasi inilah, baik di pusat maupun daerah, merupakan syarat yang paling mahal dan paling susah. Ego-sektoral masih menonjol, takut kewenangannya lari ke tempat lain. Padahal masa sekarang ini kita tidak bisa lagi mengandalkan pola kerja seperti itu," jelas Sutarmidji.

MoU ini katanya merupakan landasan bagi Pemkot Pontianak dan BPKP Kalbar untuk bekerjasama dalam ruang lingkup penindakan dan peningkatan tata kelola pemerintah baik (good governance), pengembangan sistem program pemerintah dan pendidikan atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). "Kerjasama ini dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kemitraan, terarah, terukur dan fokus pada pencapaian sasaran," ucapnya.

Pananganan masalah pencatatan dan penilaian aset daerah menjadi target utama Pemerintah Kota Pontianak. "Harus kita akui hampir di daerah di seluruh Indonesia memiliki masalah yang sama terkait persoalan aset, sehingga sulit memperbaiki opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan," tuturnya. (wti)